

**KORUPSI DALAM KONSTRUKSI MEDIA :
ANALISIS TEKSTUAL PEMBERITAAN KORUPSI
DI TELEVISI SWASTA NASIONAL INDONESIA
DALAM PERSPETIF ANALISIS WACANA KRITIS VAN DIJK**

Hari Bakti Mardikantoro
B. Wahyudi Joko Santoso

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
email: haribaktim@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tekstual dalam wacana berita korupsi pada televisi swasta nasional Indonesia. Pendekatan penelitian berupa pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori analisis wacana kritis van Dijk. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis wacana Teun A van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi tekstual pada aspek struktur makro, suprastruktur, dan struktur mikro teks berita korupsi di televisi cenderung berpihak pada gerakan menolak dan mengecam adanya kasus korupsi. Pada *Metro TV* lebih memanfaatkan kosakata informal, ekspresi eufemistik, dan penggunaan kalimat pasif. Sementara konstruksi pemberitaan di NET, wartawan lebih menggunakan kosakata lugas, penggunaan kalimat aktif, dan metafora. Dari temuan tersebut, secara umum wartawan terlihat memarjinalkan para pelaku korupsi dan memberikan citra positif kepada penegak hukum.

Kata Kunci : analisis wacana kritis, Teun A. Van Dijk, wacana berita korupsi

PENDAHULUAN

Bahasa adalah produk masyarakat. Hal ini terjadi karena bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia penutur bahasa. Dalam konteks ini, bahasa menjadi sarana komunikasi antarmanusia. Bahkan fungsi komunikasi ini merupakan fungsi utama bahasa. Dalam fungsi sebagai alat komunikasi tersebut, bahasa dimanifestasikan dalam fungsi informatif, ekspresif, direktif, estetis, dan fatis. Bahkan bahasa sebagai fungsi informatif, yakni bahasa sebagai alat penyampai informasi oleh Leech (1997:47) dianggap sebagai fungsi utama. Pada masa sekarang, dalam era globalisasi, informasi justru sudah menjadi komoditas ekonomi, sosial, dan politik yang terus diburu orang. Maka kemudian berlakulah premis *information is power* (Subrata, 1997:70).

Demikian pentingnya informasi, saat ini orang cenderung memburu informasi. Informasi yang cepat dan akurat bisa diperoleh melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Media elektronik, khususnya televisi saat ini sudah tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan manusia. Bahkan televisi sudah menjelma menjadi anggota keluarga baru di rumah-rumah sebagian besar keluarga di Indonesia. Kehidupan suatu keluarga cenderung tidak bisa lepas dengan siaran televisi. Apalagi saat ini ada begitu banyak stasiun televisi swasta nasional di Indonesia bermunculan. Dengan begitu banyaknya stasiun televisi tentunya masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan siaran. Namun dampak negatifnya juga siap mengancam kita. Dampak tersebut tidak semata-mata sisi perilaku dan konsumerisme, melainkan juga dampak bahasa akibat penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah dan situasi. Dampak bahasa ini juga akan berimbas pada perilaku pemirsa televisi.

Ada banyak acara di televisi. Tiap-tiap televisi juga punya andalan siaran. Ada acara berita, sinetron, iklan, olah raga, *talkshow*, dan masih banyak acara yang lain. Acara berita selalu muncul pada semua stasiun televisi. Bahkan beberapa televisi menjadikan berita sebagai andalannya, misalnya *Metro TV*, *TV One*, *Kompas TV*, dan beberapa televisi yang lain. Berita di televisi hadir lebih cepat karena beberapa stasiun televisi menghadirkan berita lebih dari tiga kali: pagi, siang, sore, dan malam hari.

Salah satu topik yang selalu muncul dan menarik perhatian adalah berita korupsi di televisi. Topik ini selalu muncul menjadi *head line* berita. Hal ini terjadi karena korupsi hampir selalu terjadi di Indonesia bahkan sudah membudaya. Korupsi sudah menjadi gaya hidup para pejabat kita. Masalah korupsi seperti tidak ada akhirnya, dari hari ke hari selalu bergulir. Hal ini dibuktikan oleh lembaga survei Indonesia Indikator (I2) mencatat jumlah pemberitaan tentang korupsi mencapai 152.346 dari total 1.872.234 berita sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2013. Ini artinya pemberitaan kasus korupsi menempati porsi sebesar 8,14 persen dari seluruh pemberitaan di Indonesia di luar *infotainment*. Pemberitaan korupsi pada 2013 sebanyak 12.656 per bulan meningkat dibanding 2012 yang mencapai 107.936 berita atau sekitar 8995 pemberitaan per bulan. Peneliti I2 mencatat frekuensi pemberitaan korupsi cukup tinggi dibanding tema lain seperti kemiskinan mencapai 2.724 berita per bulannya (Ridwan, 2013).

Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi pesat. Demikian salah satu kesimpulan *Transparency International* ketika merilis *Corruption*

Perceptions Index (CPI). Organisasi anti korupsi ini setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. 18 negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruhnya 100 skor. 0 berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih. Indonesia mendapat skor 34, naik dari tahun lalu, 32. Indonesia kini menduduki peringkat 107, bersama-sama dengan Argentina dan Djibouti. Tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 114 dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa. Adapun keadaan negara ASEAN lain adalah sebagai berikut: Singapura peringkat 7 dari 175 negara, Malaysia peringkat 50, Thailand peringkat 85, Filipina peringkat 90, Vietnam peringkat 119, Laos peringkat 145, Kamboja 156, sedangkan Myanmar peringkat 156 juga. Dari data tersebut terlihat bahwa Indonesia merupakan negara terkorup kelima di antara negara-negara ASEAN (*Transparency International*, 2014).

Dalam penelitian ini dikaji teks pemberitaan korupsi di televisi swasta nasional Indonesia dengan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan sebuah teks (realitas sosial) yang dikaji oleh seseorang atau sekelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan (Jorgensen dan Phillips, 2007). Artinya dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan (Darma, 2009:49). Selain itu, pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai *power* (Asher dan Simpson, 1994:940; Fairclough, 1995; Dijk, 1988). Adapun Renkema (2004:282) memandang wacana sebagai cerminan dari suatu relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai suatu bentuk praktik sosial (Fairclough dan Wodak, 1997; Wodak dan Meyer, 2006). Dalam praktik sosial, seseorang selalu memiliki tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal itu terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial pria dan wanita atau kelompok mayoritas dan minoritas (Subagyo 2010:177). Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak semata-mata mengkaji wacana dari segi internal dan eksternal, tetapi dapat dianggap sebagai ‘jendela’ untuk melihat motif-motif ideologis dan kepentingan hubungan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini akan memotret wacana pemberitaan korupsi di televisi swasta nasional Indonesia dengan analisis wacana kritis. Adapun model analisis wacana kritis yang digunakan adalah model Teun A. van Dijk. Pendekatan ini melihat faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana

wacana itu diproduksi. Proses produksi wacana menyertakan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial (Dijk, 1980).

METODE PENELITIAN

Wacana secara umum dipahami sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Apapun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa (*addressor*) dan pesapa (*addressee*). Suatu wacana umumnya dibangun oleh satuan-satuan lingual dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, pengkajian wacana selalu melibatkan berbagai pendekatan dengan maksud agar kajian itu secara komprehensif bisa menjelaskan wacana secara utuh.

Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan kritis. Pendekatan sosiologis empiris memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks situasi (Asher dan Simpson 1994:940). Pendekatan sosiologis empiris mengkaji wacana dari segi eksternalnya. Dari segi eksternal, wacana dapat dikaji keterkaitannya dengan tiga hal, yaitu pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra wicara atau keterkaitan wacana dengan konteksnya, yaitu siapa penuturnya, ditujukan kepada siapa, dituturkan dalam situasi macam apa, dimaksudkan untuk apa, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apabila wacana dikaitkan dengan konteksnya berarti analisis wacana itu dikaji secara pragmatis.

Di samping itu, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan kritis. Pendekatan ini menempatkan wacana sebagai *power* (kekuasaan) (Asher dan Simpson 1994; Fairclough, 1995; Dijk, 1988) atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam praktik sosial, seseorang selalu mempunyai tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal ini terjadi, praktik wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, juga kelompok mayoritas dan minoritas.

Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode simak (Sudaryanto 2015:203), yaitu menyimak penggunaan bahasa dalam memproduksi teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia. Metode itu diikuti dengan penggunaan teknik rekam dan catat. Selain itu, data dijaring juga dengan metode wawancara dengan pihak redaktur berita di televisi. Adapun data

penelitian berupa penggalan teks berita korupsi di televisi swasta nasional Indonesia. Pengambilan data dilaksanakan selama dua bulan dengan pertimbangan dalam waktu tersebut diasumsikan data yang didapatkan sudah cukup dan bervariasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis van Dijk (Wodak and Meyer, 2006). Van Dijk membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi, yakni dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks/praktik sosial (Dijk, 1980; Dijk, 1988). Dimensi teks yakni struktur teks yang terdiri atas kosakata, kalimat, paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Suatu teks terdiri atas tiga struktur/tingkatan yakni struktur makro (makna umum, diamati dengan melihat topik atau tema dalam teks), superstruktur (struktur teks yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh: pendahuluan, isi, penutup), dan struktur mikro (makna teks yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni kata, kalimat, paragraf).

DIMENSI TEKSTUAL PEMBERITAAN KORUPSI DI TELEVISI SWASTA NASIONAL INDONESIA

Berita korupsi merupakan salah satu isu yang selalu menghiasi media massa Indonesia. Korupsi merupakan parasit yang merusak sistem masyarakat dan pemerintahan, serta menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Praktik korupsi yang ada sukar sekali bahkan hampir tidak mungkin diberantas. Hingga saat ini korupsi merupakan bahaya laten, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh bagian-bagian masyarakat.

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis wacana kritis terhadap konstruksi wacana berita korupsi pada televisi swasta nasional Indonesia. Hasil analisis ini meliputi analisis tekstual yang dibedah melalui tiga tingkatan, yakni makrostruktur (tematik), superstruktur (skematik), dan mikrostruktur (semantik, sintaksis, stilistik, dan retorika).

1. Analisis Struktur Makro Wacana Berita Korupsi di Televisi Swasta Nasional Indonesia

Dalam tataran tekstual tingkatan struktur makro ditemukan elemen tematik dalam pemberitaan kasus korupsi di televisi swasta nasional Indonesia, yaitu adanya kasus korupsi yang semakin masif di Indonesia sehingga menarik untuk dijadikan *headline* atau topik pemberitaan. Selain itu,

disahkannya Perpres No. 86 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli oleh Presiden Joko Widodo juga menjadi faktor pemilihan tema kasus korupsi dalam pemberitaan di media televisi tersebut.

Tabel 4.1 Judul Wacana Berita Korupsi Pilihan pada *Metro TV* dan *NET TV* Periode bulan Oktober sampai November 2016

| No | Topik | Judul Berita | | Tanggal Tayang |
|----|----------------------------------|--|---|-----------------|
| | | <i>Metro TV</i> | <i>NET TV</i> | |
| 1 | Kasus Suap Impor Gula | Kasus Suap Irman Gusman | Irman Gusman Kembali Diperiksa KPK | 4 Oktober 2016 |
| 2 | Pungli di Kemenhub | Berantas Pungutan Liar | 6 Orang Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Pungli | 12 Oktober 2016 |
| 3 | Suap di Dinas Pendidikan Kebumen | Anggota DPRD & PNS Dispar Kebumen Jadi Tersangka | 5 Orang Masih Menjalani Pemeriksaan | 16 Oktober 2016 |
| 4 | Penjualan Aset BUMD Jatim | Dahlan Iskan Ditahan | Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai Tersangka | 28 Oktober 2016 |
| 5 | Korupsi E-KTP | Korupsi Proyek E-KTP | Agus Martowardojo Penuhi Panggilan KPK | 1 November 2016 |
| 6 | Pemerasan di P. Belawan | Kasus Pemerasan di Indonesia | Petugas Lakukan OTT di Koperasi Belawan | 1 November 2016 |

Metro TV menyajikan pemberitaan yang beragam mengenai kasus korupsi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan seperti yang terlihat pada tabel pemetaan berita di atas, ditemukan 23 berita mengenai kasus pungutan liar, 10 berita mengenai kasus penjualan aset BUMD di Jawa Timur, 14 berita mengenai kasus E-KTP, dan 21 berita mengenai kasus korupsi dan suap yang terjadi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan distribusi Bulog. Sementara *NET TV* juga menyajikan pemberitaan yang beragam mengenai kasus korupsi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ditemukan 26 berita mengenai kasus pungutan liar, 16 berita mengenai kasus penjualan aset BUMD di Jawa Timur, 2 berita mengenai kasus E-KTP, dan 12 berita mengenai kasus korupsi dan suap yang terjadi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan distribusi Bulog.

Setelah dilakukan pemetaan dari berita korupsi yang terdapat di *Metro TV* dan NET, selanjutnya dipilih beberapa wacana yang mewakili setiap tema pemberitaan korupsi yang terdapat

di kedua media tersebut. Maka dipilih 12 wacana berita korupsi dengan rincian 6 berita pada masing-masing media televisi. Keenam tema berita tersebut terdiri atas tema kasus suap kuota impor gula, kasus pungutan liar di Kemenhub, kasus suap di Dinas Pariwisata Kebumen, kasus pelepasan aset BUMD, kasus KTP elektronik, dan kasus pemerasan di Pelabuhan Belawan. Setelah berita dipilih, kemudian dilakukan analisis tekstual pada wacana tersebut dengan mengikuti perspektif analisis wacana kritis van Dijk. Analisis tekstual tersebut terdiri atas tiga aspek analisis, yaitu analisis struktur makro, analisis superstruktur, dan analisis struktur mikro.

2. Analisis Super Struktur Wacana Berita Korupsi di Televisi Swasta Nasional Indonesia

Selain tingkatan struktur makro, pada tingkatan super struktur dalam konstruksi pemberitaan di televisi swasta nasional Indonesia juga ditemukan struktur skematik yang berbeda. Menurut van Dijk, arti penting skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya menyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

Judul berita “Kasus Suap Irman Gusman” di *Metro TV* dianalisis dengan struktur skematik. Hasil analisis berita pada *Metro TV* tersebut menunjukkan bahwa wartawan mencoba menyembunyikan bagian yang penting dari wacana berita tersebut sehingga informasi mengenai terlibatnya Irman Gusman dalam kasus kuota impor gula menjadi tidak fokus lagi karena dalam pemberitaan tersebut difokuskan pada cerita kronologis yang menunjukkan bahwa yang bersalah bukanlah Irman Gusman, melainkan Memi selaku pengusaha yang meminta distribusi gula.

Penggunaan strategi dalam memberikan makna terhadap “Kasus Suap Irman Gusman” tersebut pun dapat diketahui dari bagian mana yang menjadi awal atau pendahuluan dalam topik berita tersebut. Bagian awal tulisan tersebut mengungkapkan adanya agenda rapat dengar pendapat untuk mendengarkan pendapat dari Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti. Selanjutnya pada bagian isi, penulis mengungkapkan bagaimana kronologis rapat dengar pendapat oleh Tim 10. Kasus tersebut dijabarkan secara jelas. Namun, penjelasan yang tegas terhadap kasus tersebut diubah dengan kenyataan bahwa Djarot Kusumayakti tidak berani mengatakan bahwa Irman Gusman berperan penting dalam kasus tersebut, namun berpendapat bahwa ada orang lain yang lebih

berperan dalam adanya kasus suap tersebut. Selain itu, dengan hanya diutarakan sedikit saja tentang Irman Gusman selaku tersangka kasus tersebut, fokus perhatian pembaca diarahkan pada fokus yang lain. Kemudian diakhir paragraf penutup memberikan informasi adanya rencana rapat dengar pendapat mengenai industri pergulaan dengan menteri perindustrian. Namun, pernyataan tersebut seolah hanya menjadi pelengkap yang tidak begitu penting dan sinkron dengan topik berita.

Dalam pemberitaan di *NET TVTV* dengan judul berita “Irman Gusman Kembali Diperiksa KPK”, dianalisis dengan struktur skematik. Hasil analisis berita pada media *NET TVTV* tersebut menunjukkan bahwa wartawan juga meletakkan bagian yang menonjol pada semua bagian dan disimpulkan lagi di bagian akhir sehingga pernyataan yang lebih terbuka dari wartawan dapat dengan mudah dipahami masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengungkapan strategi penulis pada berita di *NET TVTV* dapat diketahui dari bagaimana penulis mengemukakan maksud tulisannya ada bagian akhir. Bagian awal tulisan ini sangat berbeda dengan penjabaran berita di *Metro TV*. Wartawan lebih mengutamakan pemeriksaan Irman Gusman oleh KPK. Selanjutnya wartawan memunculkan pernyataan yang bertentangan dengan paragraf pertama dengan menunjukkan pernyataan dari Djarot Kusumayakti mengenai telepon Irman Gusman padanya. Pemberitaan diakhiri dengan penjelasan mengenai kronologi kasus penangkapan Irman Gusman dan keterkaitan kasus suap tersebut. Dilihat secara skematik, berita di atas menunjukkan hasil pemeriksaan Irman Gusman oleh KPK. Berita tersebut memberikan pernyataan pertentangan dengan ditandai adanya pernyataan dari tokoh yang saling bertentangan. Pada bagian akhir atau penutup berita ini, wartawan menyimpulkan kronologis penangkapan Irman Gusman dengan tujuan agar masyarakat bisa menyimpulkan sendiri kebenaran dari berita tersebut.

Berdasarkan penganalisisan skematik berita pada media *Metro TV* dan *NET TV*, menunjukkan bahwa kedua media tersebut lebih mengutamakan penjelasan peristiwa. Penjelasan tersebut diungkapkan lebih dahulu, kemudian memberikan sedikit penjelasan yang mengambang terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dengan demikian, tergambar jelas bahwa wartawan di *Metro TV* berusaha menyembunyikan siapa pihak sebenarnya yang terlibat secara pasti dengan kasus tersebut, namun wartawan di *NET TV* secara tegas dan lugas menunjukkan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

3. Analisis Struktur Mikro Wacana Berita Korupsi di Televisi Swasta Nasional Indonesia

Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni struktur semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Struktur mikro semantik pada pemberitaan kasus korupsi yang dituliskan oleh wartawan *Metro TV* dan *NET TV* memberikan arti pada keseluruhan berita bahwa pada level semantik diberikan latar yang menimbulkan detil dan maksud dari pemberitaan kasus korupsi yang dikonstruksi. Pada pemberitaan di *Metro TV*, konstruksi yang ditampilkan memberikan kesan bahwa wartawan *Metro TV* terlihat kurang begitu konsisten dalam memberitakan suatu kasus korupsi. Dalam subbab ini akan dijelaskan latar pemberitaan secara detil sebagai berikut.

- (1) Tim 10 atau tim pengajuan permasalahan terkait kasus Irman Gusman hari ini sejak pukul 10 pagi tadi sudah mendengarkan pendapat atau pandangan dari Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengenai kasus Irman Gusman yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam dugaan suap distribusi gula impor di Sumatera Barat (Kasus Suap Irman Gusman, *Metro TV*, 4 Oktober 2016)

Latar pada pemberitaan ini adanya agenda rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Tim 10 guna mendengarkan pendapat dari Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengenai kasus Irman Gusman. Peristiwa inilah yang mengawali adanya konstruksi atau pembentukan berita sedemikian rupa sehingga pendengar berita memahami jalannya proses hukum Irman Gusman. Hal ini berbeda dengan latar yang diangkat dalam pemberitaan di *NET TV* seperti berikut.

- (2) 16 September lalu, Irman Gusman ditangkap KPK di rumah dinas setelah menerima uang suap sebesar 100 juta rupiah. Suap tersebut terkait dengan rekomendasi pengurusan kuota distribusi gula impor yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya pada tahun 2016 kepada provinsi Sumatera Barat. (Irman Gusman Kembali diperiksa KPK, *NET*, 4 Oktober 2016)

Pada penggalan berita di atas, wartawan *NET TV* memilih latar berita kronologi awal kasus suap Irman Gusman. Dari latar yang diletakkan di akhir berita tersebut bertujuan untuk menguatkan argumen atau pernyataan yang berlawanan di tubuh berita yaitu antara pernyataan Irman Gusman dan Djarot Kusumayakti. Oleh karena itu, dimunculkan kembali kronologi dan alasan penangkapan Irman Gusman di akhir berita agar masyarakat bisa menyimpulkan sendiri inti berita tersebut.

- (3) Malam ini Dahlan Iskan selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelepasan asset PT Panca Wira Usaha. Dahlan Iskan diyakini ikut serta dalam pelepasan asset BUMD yang pernah dipimpinnya tersebut (Dahlan Iskan Ditahan, *Metro TV*, 28 Oktober 2016).

Latar pada berita berjudul “Dahlan Iskan Ditahan” tersebut dimulai dari penetapan tersangka pada Dahlan Iskan dalam kasus dugaan penjualan aset BUMD Jatim. Dari penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka tersebut, secara eksplisit wartawan *Metro TV* meyakini bahwa Dahlan ikut terlibat dalam pelepasan aset BUMD dan pemberitaan itu dikonstruksi sedemikian rupa untuk memarjinalkan Dahlan Iskan di mata masyarakat.

- (4) Dahlan Iskan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jawa Timur oleh BUMD PT Panca Wira Usaha. Dahlan Iskan yang sempat menjabat Direktur Utama di PT PWU tahun 2000 hingga 2010 dianggap bertanggung jawab atas dugaan korupsi pelepasan dua buah aset di Kabupaten Kediri dan Tulungagung senilai 17 dan 18 milyar rupiah (Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai Tersangka, NET, 28 Oktober 2016).

Hampir sama dengan konstruksi berita di *Metro TV* mengenai kasus penjualan aset BUMD, wartawan *NET TV* juga memilih peristiwa penetapan tersangka Dahlan Iskan sebagai latar dalam berita berjudul “Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai Tersangka” tersebut. Namun ada yang berbeda di antara pemberitaan tersebut yaitu kalimat penjelas yang mengikuti latar berita tersebut. Pada pemberitaan di *Metro TV* terlihat jelas bahwa tujuan pengonstruksian beritanya berusaha untuk memarjinalkan Dahlan Iskan, sedangkan pemberitaan di *NET TV* kalimat penjelas dalam berita disajikan dengan menyisipkan pernyataan dari dua pihak yaitu tersangka yakni Dahlan Iskan dan pihak kejaksaan yakni Dandeni Herdiana. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa wartawan *NET TV* berusaha untuk bersikap netral dengan mengikuti format konstruksi berita dengan memasukkan dua argumen dari dua pihak yang bersangkutan.

Sementara elemen maksud yang berhubungan dengan struktur semantic menguraikan informasi secara eksplisit dan jelas untuk informasi yang menguntungkan komunikator atau dalam hal ini wartawan.

- (5) Untuk pengakuan dari Dahlan Iskan, dia ditetapkan tersangka hanya karena menandatangani berkas yang dijual ataupun berkas untuk penjualan aset. Apakah hal itu cukup untuk hanya menetapkan dia sebagai tersangka, Pak? Apakah ada hal-hal lain yang memberatkan seperti itu? “Ya tentu tidak hanya hal itu dan **akan** kita buka di persidangan nanti apa saja yang menjadi faktor perbuatan materil tidak hanya formal seperti yang bersangkutan itu sebutkan untuk membuktikan bahwa memang secara formal dan material yang bersangkutan itu memang terdapat cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.” jawab Dandeni Herdiana (Dahlan Iskan Ditahan, *Metro TV*, 28 Oktober 2016).

Dalam penggalan berita tersebut, wartawan menggambarkan secara jelas bahwa Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka bukan hanya karena menandatangani berkas yang dijual, melainkan ada barang bukti lain yang cukup kuat untuk menetapkan Dahlan sebagai tersangka. Penyampaian maksud dalam berita tersebut melalui strategi wawancara langsung dengan Dandeni Herdiana ketika tayangan live. Pertanyaan yang ditanyakan wartawan pun juga mengarah pada jawaban yang dimaksud oleh wartawan untuk mematahkan argumen Dahlan bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka hanya karena menandatangani berkas saja.

- (6) “Hari ini ada sekitar mungkin 15 pertanyaan dan setelah penyidik menilai bahwa minimal 2 alat bukti yang cukup, maka kali ini saudara DI kita nyatakan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset yang dikelola PT PWU tahun 2002 sampai 2004.” tutur Dandeni Herdiana, Kasidik Pidsus Kejati Jatim (Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai Tersangka, NET, 28 Oktober 2016).

Pada topik dan fokus berita yang sama dengan berita di *Metro TV*, wartawan *NET TV* mengonstruksi berita mengenai penetapan tersangka Dahlan Iskan dengan cara yang berbeda. Wartawan *NET TV* hanya menginformasikan dari cuplikan tuturan Dandeni Herdiana mengenai alasan penetapan Dahlan Iskan yang menyebutkan bahwa minimal 2 alat bukti sudah cukup untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dapat merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi.

Struktur mikro sintaksis yang ada pada pemberitaan selalu menampilkan berita dalam bentuk kalimat aktif dan keseluruhan sentral kalimat aktif ini menempatkan proposisi pelaku korupsi pada proposisi awal. Sehubungan dengan aspek sintaksis, kedua media tersebut menunjukkan adanya ketransitifan yang sebagian besar klausa dikonstruksi dalam bentuk klausa aktif (S+P+O) dan disajikan dengan pola kalimat berbentuk tindakan. Adanya dominasi kalimat yang berbentuk tindakan tersebut menunjukkan bahwa baik *Metro TV* maupun *NET TV* memunculkan kehadiran pelaku yang merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap sasaran agar diketahui mitra tutur atau masyarakat.

Selain ketransitifan, dari analisis bentuk pengingkaran pada wacana berita korupsi antara *Metro TV* dan *NET TV* ditemukan bahwa wartawan *NET TV* lebih banyak dan bervariasi dalam mendayagunakan bentuk ingkar daripada wartawan *Metro TV*. Bentuk kalimat negatif yang terdapat di *Metro TV* berupa bentuk negasi *tidak* dan *bukan*, sedangkan pada *NET TV* menggunakan bentuk negatif berupa *tidak*, *bukan*, dan *jangan*, seperti pada penggalan data berikut.

- (7) Dan memang keterlibatan dari Dahlan Iskan ini merupakan hal yang **tidak aneh** karena ia menjabat sebagai direktur utama PT Panca Wira Usaha sejak tahun 2000 hingga 2010. Diduga aset-aset ini dilepas secara **tidak wajar**, yaitu dijual dengan harga di bawah NJOP, kemudian **tidakmelalui persetujuan** dari DPRD Jawa Timur. Dan juga ada dugaan yang menguat bahwa uang ini **tidak semuanya** masuk ke kas negara dan ada yang masuk ke beberapa pihak tertentu. (Dahlan Iskan Ditahan, *Metro TV*, 28 Oktober 2016)
- (8) Ia bersikeras **tidak pernah menerima** uang hasil korupsi dan hanya menandatangani dokumen yang telah disusun oleh stafnya.
“Kemudian harus menjadi tersangka yang **bukan** karena makan uang, **bukan** karena menerima sogokan, **bukan** karena menerima aliran dana, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.” tutur Dahlan Iskan. (Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai Tersangka, NET, 28 Oktober 2016)

Dari media *Metro TV*, penggunaan kalimat negatif dapat ditemukan pada topik berita OTT pungli di Kemenhub, kasus pungli di Kebumen, kasus penjualan aset BUMD, dan kasus pemerasan di Pelabuhan Belawan. Sementara itu, pada media NET, penggunaan kalimat negatif yang ditandai dengan adanya kosakata pengingkar dapat ditemukan pada topik berita kasus suap kuota impor gula, OTT pungli di Kemenhub, kasus penjualan aset BUMD, dan kasus pemerasan di Pelabuhan Belawan. Kosakata pengingkar yang dimanfaatkan kedua media tersebut adalah kata *tidak* dan *bukan*. Dalam hal ini, negasi yang digunakan dalam wacana berita merupakan strategi wartawan atas ketidaktegasannya dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada masyarakat. Penggunaan kalimat negatif tersebut merupakan bentuk praktik diskursus yang menggambarkan ekspresi dan sikap wartawan yang disembunyikan secara implisit.

Struktur mikro stilistik pada wacana berita korupsi di *Metro TV* dan *NET TV* terdapat perbedaan pada pemilihan kosakata dalam mengonstruksi berita korupsi. Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata/diksi atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Setelah dilakukan analisis, peneliti menemukan beberapa pilihan kata yang digunakan seperti “mempertimbangkan” yang bermakna keraguan dalam mengambil keputusan, seperti pada penggalan data berikut.

- (9) Dari Operasi Tangkap Tangan atau OTT didapati barang bukti uang tunai sebanyak 34 juta di loket pelayanan lantai 6, dan 61 juta di ruangan lantai 12, dan 1 **rekening penampungan** dengan nilai uang mencapai 1 milyar rupiah. (Berantas Pungutan Liar, *Metro TV*, 12 Oktober 2016)

- (10) “Kemudian yang di lantai 12 ada sekitar 61 juta rupiah untuk tunai, kemudian yang dalam **bentuk tabungan** ada sekitar 1 milyar rupiah.” tutur Kombes Pol Awi Setiyono. (6 Orang Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Pungli, NET, 12 Oktober 2016)

Dalam penggalan berita di atas, terlihat penggunaan frasa *rekening penampungan* dari pemberitaan di *Metro TV* yang merupakan ekspresi penghalusan untuk menyebutkan kata yang dirasa kasar atau menyinggung pihak lain, seperti pada penggalan berita dari *NET TV*. *Rekening penampungan* merupakan ungkapan penghalusan untuk menjelaskan bahwa rekening tersebut bukan digunakan untuk menabung, namun digunakan untuk menampung uang dari pihak-pihak tertentu. *Rekening penampungan* tersebut dalam praktiknya adalah fiktif. Dalam artian bahwa pemilik rekening penampungan tersebut sebenarnya adalah pelaku sendiri dengan menggunakan KTP palsu atau KTP orang lain yang berarti melawan hukum. Dalam hal ini, wartawan *Metro TV* memilih mendayagunakan frasa *rekening penampungan* untuk memperhalus dan mengaburkan maknanya. Berbeda dengan wartawan *NET TV* yang secara lugas menyebutkan barang bukti uang dalam *bentuk tabungan*, sehingga masyarakat dengan jelas bisa memahami konteks berita tersebut. Wartawan *NET TV* menggunakan bentuk lugas dan bukan penghalusan seperti dalam penggalan berita di *Metro TV* karena untuk menegaskan bahwa barang bukti yang ditemukan dari OTT pungli tersebut berbentuk uang dalam tabungan. Dari kedua hal tersebut terlihat bahwa *NET TV* secara tegas dan lebih lugas dalam memberitakan kasus pungli tersebut.

- (11) Tiga perusahaan swasta dan 100 Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran di Jakarta ini diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka diduga melakukan **pengurusan dokumen tak sesuai dengan prosedur** yang ditetapkan (Berantas Pungutan Liar, *Metro TV*, 12 Oktober 2016).
- (12) Empat instansi swasta kedatangan **menyuap** oknum petugas untuk mempercepat proses pembuatan dokumen lisensi pelaut. Di antaranya PT CIS, SMK Pelayaran Santa Lusiana Jakarta, PT Sumber Bakat Insani, dan PT KSM (6 Orang Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Pungli, NET, 12 Oktober 2016).

Dalam penggalan berita di atas, terlihat penggunaan frasa *pengurusan dokumen tak sesuai dengan prosedur* dari pemberitaan di *Metro TV* yang merupakan ekspresi penghalusan untuk mengungkapkan maksud dari kata *menyuap*, seperti pada penggalan berita di *NET TV*. Berkaitan dengan hal tersebut, frasa *pengurusan dokumen tak sesuai dengan prosedur* tersebut digunakan wartawan untuk menimbulkan nuansa ‘penghalusan maksud’. Adapun maksud wartawan *Metro TV* yang mendayagunakan penghalusan tersebut karena wartawan terlihat belum yakin dengan

keterlibatan perusahaan swasta dan instansi pendidikan tersebut terkait dengan kasus penyuapan tersebut. Hal itu terlihat dengan penggunaan modalitas ‘keteramalan’ berupa kata *diduga*. Sementara pemberitaan di *NET TV* dalam kasus yang sama, wartawan secara lugas memilih kosakata *menyuap* untuk mengungkapkan keterlibatan beberapa instansi swasta dengan kasus di Kementerian Perhubungan tersebut. Dari kedua pemilihan diksi tersebut dapat dinilai bahwa wartawan *NET TV* lebih jelas dan lugas dalam memberitakan suatu kasus korupsi, dan tidak berusaha untuk mengaburkan makna seperti halnya di *Metro TV*.

Struktur mikro retorik pada pemberitaan kasus korupsi ditemui pada berita mengenai penjualan asset BUMD Jatim yang menjerat Dahlan Iskan. Dalam hal ini, wartawan *NET TV* lebih sering menggunakan kosakata metafora dalam wacana berita yang dikonstruksikannya seperti *menggurita, menduduki kursi, kantong, pincang, makan uang, menerima sogokan, dan menerima aliran dana, dan pemeriksaan maraton*. Salah satunya dapat dilihat pada penggalan berikut.

(13) “Kemudian harus menjadi tersangka yang bukan karena **makan uang**, bukan karena **menerima sogokan**, bukan karena **menerima aliran dana**, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.” tutur Dahlan Iskan, Tersangka Kasus Korupsi (*Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai Tersangka, NET, 28 Oktober 2016*).

Dalam penggalan berita berupa tuturan Dahlan Iskan tersebut, Dahlan berkali-kali menggunakan metafora yakni *makan uang, menerima sogokan, dan menerima aliran dana*. Metafora tersebut digunakan sebagai bentuk penyangkalan yang diucapkan beberapa kali dengan menggunakan istilah yang berbeda. Dalam konteks berita tersebut, pendayagunaan kata *makan uang, sogokan, dan aliran dana* dibandingkan dengan ‘memakan uang yang bukan haknya’ atau dengan kata lain ‘melakukan korupsi’. Oleh karena itu, digunakanlah metafora *makan uang, sogokan, dan aliran dana* untuk menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya menurut sudut pandang Dahlan Iskan.

(14) Ini bukan pertama kalinya Dahlan **tersandung** kasus hukum. Pada tahun 2013, Dahlan disebut dalam dakwaan tersangka kasus mobil listrik ... Lolos dari kasus mobil listrik, dua tahun kemudian Dahlan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pembangunan Gardu Induk PLN oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Namun Dahlan memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan status tersangkanya **digugurkan** (*Kasus Hukum Dahlan Iskan, Metro TV, 29 Oktober 2016*).

Dari dua penggalan berita dalam satu judul berita di atas terdapat dua penggunaan metafora berupa *tersandung* dan *digugurkan*. Kata *tersandung* memiliki makna leksikal ‘terantuk kakinya pada sesuatu dengan tidak sengaja’. Akan tetapi ketika kata *tersandung* dalam penggalan tersebut sebagai metafora verbal, yang membandingkan ‘kasus hukum’ dengan ‘batu’ sebagai pembanding. Dalam konteks berita tersebut menunjukkan bahwa Dahlan Iskan mendapatkan halangan yang sudah biasa terjadi di tengah perjalanannya dan hal itu merupakan sesuatu yang dinilai hal sepele atau kecil. Sementara pada penggalan berita kedua terdapat kata *digugurkan* yang terbentuk dari kata dasar ‘gugur’ yang memiliki makna leksikal ‘jatuh sebelum masak atau rontok’, tetapi akan berbeda nuansa maknanya apabila dimanfaatkan pada kalimat tersebut. Dalam hal ini, penggunaan metafora verbal *digugurkan* pada kalimat tersebut memiliki maksud bahwa status tersangka sebagai terbanding, dan daun sebagai pembanding. Dalam konteks berita tersebut menunjukkan bahwa status tersangka Dahlan Iskan bisa dengan mudah digugurkan atau dibatalkan selayaknya daun yang gugur. Dari penjabaran di atas dapat ditemukan beberapa penggunaan metafora untuk mengonkretkan suatu konsep dan menegaskan ideologi bahwa pihak media *Metro TV* tidak setuju dengan perbuatan korupsi dan pelaku korupsi itu sendiri. Beberapa penggunaan metafora dalam penggalan berita di atas di antaranya yaitu *tersandung* dan *digugurkan*. Pendayagunaan metafora dalam pengonstruksian wacana berita korupsi tersebut bertujuan sebagai strategi bertutur untuk melancarkan maksud tertentu pada mitra tutur atau masyarakat.

SIMPULAN

Analisis terhadap konstruksi wacana berita pada *Metro TV* dan *NET TV* dilakukan melalui tahap representasi teks dengan menggunakan perspektif analisis wacana kritis van Dijk. Berdasarkan pembahasan struktur makro, yaitu elemen tematik dari kedua media televisi tersebut, dapat dilihat perbedaan bahwa pada media *Metro TV* terlihat lebih mengutamakan penetapan topik secara umum dan diarahkan kepada subtopik yang mendukung topik sehingga tergambar bagaimana sikap wartawan. Dari gambaran konstruksinya, *Metro TV* hanya dianggap tidak terlalu berani untuk mengkritisi suatu berita. Sementara itu, dalam *NET TV*, wartawan media lebih menekankan bahasa yang lugas dan berani untuk mengkritisi sebuah berita.

Konstruksi wacana dalam pemberitaan kasus korupsi di *Metro TV* dan *NET TV* dari dimensi teks Teun van Dijk, antara lain ditemukan bahwa wacana berita tersebut mampu memaparkan segi

semantik atau makna yang ditekankan dengan baik, seperti pendeskripsian latar dan detil secara keseluruhan teks. Semantik ini sama halnya seperti elemen jurnalisme atau mencatat secara detil dan komprehensif. Dalam pemilihan kata atau leksikon, baik wartawan *Metro TV* dan *NET TV* menggunakan kosakata eufemisme dan juga yang berkonotasi negatif terhadap para pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asher, R.E dan J.M.Y Simpson (Eds). 1994. *The Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 2*. Oxford : Pergamon Press.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung : Yrama Widya.
- Dijk, Teun A. van. 1980. *Discourse Analysis in Society*. London : Academic Press Inc.
- Dijk, Teun A.van. 1988a. *Newa as Discourse*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Dijk, Teun A.van. 1988b. *Macrostructures, An Interdisciplinary Study of Global Stuctures in Discourse, Interaction, and Cognition*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language*. New York: Longman.
- Fairclough, N dan Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis: An Overview" dalam Teun van Dijk (ed). *Discourse and Interaction*. London : Sage Publications, 67-97.
- <http://www.dw.com/id/indeks-korupsi-peringkat-indonesia-membaik-tapi-masih-buruk/a-18107694>.
Diunduh tanggal 27 Mei 2016.
- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana, Teori dan Metode*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Leech. Geoffrey. 1997. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Terj. M.D.D Oka. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. "Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi Di Surat Kabar Berbahasa Indonesia". *Jurnal Litera*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2014, hal. 215-225.
- Renkema, J. 2004. *Introduction to Discourse Studies*. Philadelphia : John Benjamin Publishing Company.

Ridwan, Taufik. 2013. *Survei: 152.346 Berita Korupsi Selama 2013*. <http://www.antaraneews.com>. (diunduh 29 November 2016).

Subagyo, Paulus Ari. 2010. "Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis" dalam *Jurnal Linguistik Indonesia*, Tahun ke-28, Nomor 2, Agustus 2010, hal. 177-187.

Subrata. 1997. "Penggunaan Bahasa Jurnalistik pada Media Massa: Pendekatan Empiris" dalam Sudaryanto dan Sulistyono (eds.). *Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang : Citra Almamater, hal. 65 - 75.

Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa, Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta : Sanata Dharma University Press.